

Tangani Perubahan Iklim Secara Serius

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono, menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim, di Kantor Presiden, Jumat (30/9) pukul 14.30 WIB. Rapat membahas langkah-langkah nasional dalam upaya mengelola atau mengatasi dampak perubahan iklim.

Dalam pengantarnya, Presiden SBY kembali mengingatkan bahwa masalah perubahan iklim juga menjadi agenda nasional Indonesia. "Saya ingin mengingatkan bahwa upaya mengatasi perubahan iklim adalah agenda kita, agenda nasional bukan hanya dunia," kata Presiden di awal pengantarnya.

Presiden SBY meminta semua pihak untuk benar-benar serius menangani dampak perubahan iklim, jangan dianggap sambilan. "Saya ingin kita tetap aktif dalam berperan serta menyiapkan protokol baru pengganti Protokol Kyoto. Jangan dianggap sambilan, ini penting. Mari lebih serius lagi, ajak semua *stake holders*," Presiden SBY menegaskan.

Oleh karena itu, lanjut Presiden SBY, harus dilakoni dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan. "Sikap kita haruslah dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan untuk mensukseskan agenda ini, tidak boleh terpaksa atau karena ini komitmen global," Presiden menekankan. "Yang penting mari kita jaga konsistensi dan ke depannya berbuat nyata dan lebih banyak lagi."

Selain itu, Kepala Negara juga menyadari adanya sejumlah persoalan dalam menangani masalah ini. Diantaranya persoalan koordinasi dan sinergi antar kementerian, antara pusat dan daerah, dan juga antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat umum. Menurut Presiden, jika ada persoalan, dapat dikembalikan kepada visi dan kebijakan dasar terkait perubahan iklim dan sasaran pembangunan.

"Saya harap ke depan masalah itu bisa diatasi, jangan merugi dan gagal untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi karena persoalan internal pada tingkat nasional," ujar Presiden "Kita pun sudah gigih untuk mencapai sasaran pembangunan kita. Sasaran itu harus dicapai tanpa merusak lingkungan," tambahnya.

Presiden berharap Dewan Nasional Perubahan Iklim dapat bekerja dan berupaya untuk memastikan pelaksanaan pembangunan. "Kembalikan semuanya itu kepada strategi 4 jalur, tidak harus memilih salah satu. Semua bisa dihadirkan secara harmonis," Presiden SBY menegaskan.

Hadir dalam rapat ini para menteri KIB II, diantaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Mendagri Gamawan Fauzi, Menhub Freddy Numberi, Menkeu Agus Martowardojo, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Menhut Zulkifli Hassan, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, dan Seskab Dipo Alam.

Dewan Nasional Perubahan Iklim dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2008. Fungsinya untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim. Dewan ini dipimpin Presiden dengan wakil Menko Kesra dan Menko Perekonomian. Rachmat Witoelar ditunjuk menjadi Ketua Harian. Friederich Batari